

Partisipasi Organisasi Sosial dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Social Organization Participation on Inhabitable House Rehabilitation

Setyo Sumarno

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial,
Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial
Jl Dewi Sartika No 200 Cawang III, Jakarta Timur, Telp 021-8017146 E-mail: <setyosumarno@rocketmail.com>.
Diterima 14 Desember 2015, diperbaiki 20 Desember 2015, disetujui 20 Februari 2016.

Abstract

House is one the basic of need, as a place of rest and refuge from a variety of situations and threats. House is as well as a medium for the creation of social interaction, cultural tranfer, implementattion of family education, and even becomes a status symbol. For the moyority of people considered a poor family, house is just as a given regardless of its feasibility in terms of physical, mental and social. Jam'iyyah foundation ar Rahmah Kuwait, one of social organization helped Indonesian government in overcoming poverty through ininhabitable home repairement. Aid amounting to Rp 650 million for 65 housing units concentrated in rural districts Sidorejo, Bandongan, Magelang Regency, Central Java Province. Activities came out with the involvement of cadres of disaster preparedness, youth, social workers (PSM), social workers districts (TKSK) and scouts. Community participation were in the form of money, goods, energy, and mind. This success can not be separated from the role of village offials; community leaders, who facilitated for formation of the committee and mobilize communities to work together; Camat (district leader) role in facilitating the proposal; and local goverment in funding home improvements and refining. Home improvement which was originally planned only for impermanent purpose, became permanent new home with tiled floors and walls.

Keywords: *inhabitable house; Jam'iyyah ar Rahmah foundations; rehabilitation*

Abstrak

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sebagai tempat untuk beristirahat dan berlindung dari berbagai situasi dan ancaman. Rumah juga sebagai media untuk terciptanya interaksi sosial, transfer budaya, melaksanakan pendidikan keluarga, bahkan menjadi simbol status. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin, rumah hanyalah sebagai tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik, mental dan sosial. Yayasan Jam'iyyah Ar Rahmah Kuwait salah satu organisasi sosial telah membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni. Bantuan sebesar Rp 650.000.000,- untuk 65 unit rumah dikonsentrasikan pada desa Sidorejo Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pramuka. Partisipasi masyarakat dalam bentuk, uang, barang, tenaga, ataupun pikiran. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta aparat desa; tokoh masyarakat yang telah memfasilitasi dalam pembentukan panitia dan mengarahkan masyarakat untuk bergotong royong; camat berperan dalam memfasilitasi proposal dan usulan; dan pemerintah daerah membantu dalam penambahan dana perbaikan rumah. Perbaikan rumah yang semula direncanakan hanya tambal sulam, menjadi rumah baru permanen dengan lantai keramik dan dinding tembok.

Kata kunci: Rumah tidak layak huni; Yayasan Jam'iyyah Ar Rahmah; rehabilitasi

A. Pendahuluan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan ma-

nusia untuk beristirahat dan berlindung dari berbagai situasi dan ancaman, seperti hujan, angin, binatang buas tetapi tempat untuk terpenuhinya berbagai kebutuhan dan pelaksanaan peran

dalam keluarga. Rumah menjadi media untuk terciptanya interaksi sosial, transfer budaya, melaksanakan pendidikan keluarga, bahkan menjadi simbol status. Demikian besar fungsi rumah bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Oleh karena itu, berdasarkan ketiga fungsi tersebut, rumah yang baik adalah yang memenuhi syarat fisik aman menjadi tempat berlindung, syarat mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga dan menjadi media yang baik bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan bukan hal yang mudah. Sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin, rumah hanyalah sebagai stasiun atau tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.

Permasalahan fakir miskin, di samping mereka tidak memiliki modal untuk usaha ekonomi produktif juga tidak memiliki atau mempunyai rumah tinggal yang layak huni. Kita menyadari bahwa keberadaan permukiman kelompok miskin khususnya permukiman yang berada di wilayah perkotaan atau pinggiran kota pada umumnya kurang memadai, baik dari aspek ketersediaan air bersih, saluran got dan lingkungan yang padat penghuni atau terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana umum.

Data Pusdatin Kesos pada tahun 2008 menggambarkan bahwa terdapat 2.456.521. KK yang dikategorikan memiliki rumah tidak layak huni yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Data tersebut apabila dicermati di lapangan bisa bertambah, berkaitan dengan jumlah angka kemiskinan dan pertambahan penduduk yang membutuhkan rumah. Di Kabupaten Magelang berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, jumlah rumah tangga miskin tercatat 142.583 kk tersebar di 21

Kecamatan dan 372 desa. Dari jumlah tersebut, 9.780 kk dari keluarga miskin menempati rumah tidak layak.

Penataan lingkungan perumahan melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kelompok miskin akan pentingnya tempat tinggal yang bersih, sehat dan layak huni. Untuk mencapai tempat hunian yang layak diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memelihara lingkungan yang bersih. Dampak dari lingkungan permukiman yang bersih, akan memberikan kontribusi yang positif untuk menghindari munculnya penyakit yang bisa mengganggu aktivitas masyarakat, seperti demam berdarah, diare, dan penyakit kulit.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan rumah, pemerintah (Kementerian Sosial) telah meluncurkan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan perbaikan sarana prasarana. Program ini dimulai sejak tahun 2006 dengan sasaran keluarga miskin, khusus untuk rumah tidak layak huni. Program ini merupakan suatu upaya dalam penanggulangan kemiskinan terpadu yang menyentuh akar kemiskinan, mencakup perubahan sikap, perbaikan, pemenuhan kebutuhan perumahan dan lingkungan yang sehat, peningkatan status ekonomi masyarakat miskin. Permasalahan rumah tidak layak huni yang dimiliki kelompok miskin memiliki masalah multidimensional, sehingga penanganannya memerlukan kajian yang komprehensif.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Teknik penentuan responden dan informan: Responden dipilih secara sengaja (*purposive*) individu yang berkaitan dengan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni. Mereka dipilih berdasarkan bidang tugasnya, seperti aparat Kementerian Sosial dari unit kerja direktorat penanggulangan kemiskinan perdesaan, dinas sosial provinsi dan kabupaten dari bidang pemberdayaan sosial, termasuk pendamping lapangan dan penerima

bantuan sosial. Informan juga dipilih secara purposif, diperlukan untuk lebih menggali dan memahami pelaksanaan kegiatan bedah kampung, jumlahnya informan tidak dibatasi, dilihat dari kepentingan atau keperluan data dan informasi lapangan. Teknik pemilihan lokasi: ditetapkan secara sengaja dengan alasan lokasi terpilih memperoleh program bedah kampung yang sudah berlangsung dalam tahun anggaran 2012, sebagai unit analisis, yaitu Kabupaten Magelang (Jawa Tengah).

Teknik pengumpulan data: Digunakan empat teknik, telaah dokumen yang berkaitan dengan perundang-undangan, laporan kegiatan dan hasil penelitian; Pengamatan, dengan melakukan pengamatan lapangan di lokasi pelaksanaan bedah kampung; Wawancara dilakukan terhadap individu pelaksana program, pendamping sosial, keluarga, dan tokoh masyarakat; Diskusi dilakukan dalam upaya untuk menyamakan pendapat dalam pelaksanaan kegiatan. Teknik analisis data: menggunakan teknik kualitatif, yang menekankan pada data dan keterangan yang diperoleh dari lapangan mengenai pandangan penerima bantuan karena mereka sebagai objek langsung,

C. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magelang

1. Gambaran Wilayah Magelang

Secara geografis Kabupaten Magelang berada di cekungan sejumlah rangkaian pegunungan. Di bagian timur perbatasan dengan Kabupaten Boyolali terdapat Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Di bagian barat perbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo terdapat Gunung Sumbing. Di bagian barat daya terdapat rangkaian Bukit Menoreh. Pada bagian tengah mengalir Kali Progo beserta anak-anak sungainya menuju selatan. Di Kabupaten Magelang juga terdapat Kali Elo yang membelah dua wilayah ini. Pertemuan kembali kedua kali tersebut terletak di Desa Progowati yang konon dahulu di tempat itu lebih banyak penduduk berjenis kelamin wanita daripada

pria. Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kabupaten yang secara administrasi termasuk dalam bagian dari Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Magelang berada pada posisi yang strategis dan menguntungkan karena terletak pada jalur persimpangan dari berbagai arah. Dilihat dari peta orientasi Propinsi Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Magelang memiliki posisi yang strategis karena keberadaannya terletak di tengah, sehingga mudah dicapai dari berbagai arah. Secara geoeconomis, Kabupaten Magelang merupakan daerah perlintasan, jalur kegiatan ekonomi yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo.

Dahulu wilayah Kabupaten Magelang dilalui jalur kereta api yang menghubungkan Semarang-Yogyakarta, bahkan merupakan salah satu jalur kereta api tertua yang berada di Indonesia. Stasiun yang ada ada dalam wilayah Kabupaten Magelang antara lain; Stasiun Muntilan, Stasiun Blabak, Stasiun Mertoyudan, dan Stasiun Secang. Namun, meletusnya Gunung Merapi sekitar tahun 1970 membuat jalur kereta api tersebut rusak akibat terjangan lahar, sehingga menyebabkan jalur dan stasiun tersebut tidak difungsikan lagi. Kabupaten Magelang berada di jalur strategis yang menghubungkan dua ibu kota provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY. Kota Mungkid sebagai Ibukota Kabupaten Magelang berada sekitar 15 km di sebelah selatan Kota Magelang, dapat dijangkau mudah dengan kendaraan roda empat. Di Secang terdapat persimpangan antara jalan negara antara Semarang-Magelang-Jogjakarta dan jalan provinsi menuju Temanggung.

Luas wilayah Kabupaten Magelang 1.085,73 km² (3,34 persen) dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan mempunyai lahan persawahan yang terdiri dari: sawah berpengairan sederhana 45,41 persen, sawah tadah hujan 22,70 persen, sawah berpengairan teknis 18,45 persen, sawah dengan pengairan setengah teknis 13,44 persen dan merupakan lahan kering 65,48 persen. Secara Geografis Kabupaten Magelang terletak pada 1100°01'51"-1100°26'58" Bujur Timur

dan 70°19'13" – 70°42'16" Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Magelang yaitu: sebelah utara dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah timur dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah selatan dengan Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY, sebelah barat dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

Dilihat dari kependudukan dan pendidikan, jumlah penduduk Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2008 jumlah penduduk 1.204.974 jiwa, dan tahun 2009 tambah menjadi 1.217.672 jiwa yang terdiri laki-laki 608.710 jiwa (49,98 persen) dan perempuan 608.962 jiwa (50,02 persen). Jika dilihat dari pendidikan tidak merata, khususnya pendidikan menengah banyaknya sekolah; 57 SMP Negeri, 11 SMA Negeri, dan tiga SMK. Sarana dan prasarana yang terdapat di Kabupaten Magelang yang mengakomodasi aktivitas masyarakat berupa sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, fasilitas pendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Magelang sampai dengan bulan Juni 2010 terdiri dari 223 buah Posyandu, 71 buah Poliklinik desa, 29 buah puskesmas induk, 62 Puskesmas pembantu dan 34 Armada Puskesmas Keliling, serta tiga Puskesmas Perawatan. Saat ini belum ada pembangkit tenaga listrik yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, Jangkauan pelayanan energi listrik di Kabupaten Magelang pada tahun 2007 menjangkau 372 listrik pedesaan sehingga semua desa sudah dijangkau listrik. Daerah perkotaan listrik sudah menjangkau lima daerah dan semua sudah terjangkau pelayanan listrik. Namun masih ada 40 dusun yang tersebar di Kabupaten Magelang yang belum terjangkau pelayanan listrik.

Potensi wisata yang terdapat di kabupaten Magelang Candi Borobudur merupakan obyek wisata andalan Provinsi Jawa Tengah yang kini mendapat perlindungan dari UNESCO sebagai warisan dunia (*World Heritage*). Selain Borobudur, terdapat sejumlah candi di antaranya Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Ngawen, Candi

Canggal atau Candi Gunungwukir, Candi Selogriyo, Candi Gunungsari, Candi Lumbung, Candi Pendem, dan Candi Asu. Ada satu Museum Seni Rupa Haji Widayat yang terletak antara Candi Mendut dan Borobudur. Obyek wisata alam, Kabupaten Magelang memiliki beberapa obyek wisata, antara lain kawasan wisata Kopeng, Kolam Renang Kalibening-Payaman, Gardu Pandang Ketep Pass, air panas Kedung Kayang, Gardu Pandang Babadan, Curug Silawe, Losari Coffee Plantation, pemandian air panas Candi Umbul dan air terjun Sekar Langit. Kali Progo dan Kali Elo juga sering digunakan untuk wisata arung jeram. Beberapa obyek wisata religi yang ada di Kabupaten Magelang antara lain; Langgar Agung Pangeran Diponegoro, Makam Kyai Condrojeni, Makam Sunan Geseng, dan Makam Raden Santri. Sementara itu, untuk seni budaya dan kriya terdapat beberapa Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) antara lain kesenian tradisional, kerajinan cinderamata, kerajinan mebel dan interior, serta makanan khas.

Di lingkungan Candi Borobudur, terdapat Candi Budha terbesar di dunia yang merupakan satu karya "Master Piece" peninggalan purbakala yang merupakan satu diantara tujuh keajaiban dunia. Candi Borobudur berada di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur. Letaknya sekitar tiga kilo meter dari Kota Mungkid. Kawasan candi dibangun oleh raja Samaratungga dari Dinasti Syailendra pada abad ketujuh. Saat ini kawasan candi tersebut dilengkapi dengan taman wisata, hotel, fasilitas audio visual, dan lain-lain yang dikelola oleh PT. Taman Wisata. Jumlah kunjungan pada tahun 2010 sebanyak 2.408.453 orang. Sedangkan jumlah kunjungan pada Tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus tercatat 1.241.800 orang.

2. Program Perbaikan Rumah

Sejak tahun 1970 di tiap desa ada Lembaga Sosial Desa (LSD) yang merupakan suatu lembaga sosial yang dibentuk masyarakat untuk menangani permasalahan sosial. Lembaga Sosial Desa pernah melakukan perbaikan rumah warga

yang kurang mampu dengan sebutan gerakan sosial perumahan sehat gotong royong (PSGR). Masyarakat desa diajak untuk mengumpulkan bahan bangunan yang diperlukan dalam perbaikan rumah. Selain itu menyumbangkan tenaganya dengan menyediakan waktu untuk membangun rumah warga lain yang dijadikan sasaran kegiatan. Masyarakat tidak menerima bayaran karena dilakukan secara sukarela dan bergotong royong, bisa bersamaan atau bergantian di satu tempat (Bambang Nugroho; 2013: 32). Perkembangan selanjutnya dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) yang diperingati tiap tanggal 20 Desember secara bersamaan antara masyarakat dengan pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya.

Ada tiga pendekatan (Tribina) dalam HKSAN, bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Sejak tahun 1986 (Achmadi Jayaputra, 1999: 1–2) diutamakan bina lingkungan dengan menata lingkungan kumuh menjadi pemukiman teratur. Namun tahun 1998 beralih ke kegiatan bina usaha terhadap penghuni yang tinggal di daerah kumuh, terutama yang terkena Proyek Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Jadi masyarakat yang berada di lingkungan kegiatan tersebut sebagian mendapat kegiatan perbaikan rumah dan lingkungan, serta sebagian lagi hanya memperoleh bantuan usaha. Kementerian Sosial RI, mulai tahun 2006 melakukan pemberdayaan terhadap kelompok miskin perkotaan dan perdesaan.

Terdapat empat sasaran pokok kegiatan, di antaranya penataan lingkungan kumuh. Penyediaan sarana lingkungan dan pemenuhan akan rumah tempat tinggal yang layak huni menjadi kebutuhan primer dari masyarakat miskin. Penataan lingkungan untuk mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang sehat, nyaman, rapi, tertata baik dan harmonis. Tahun 2008 (Anonim; 2012a: 4), meneruskan kegiatan RSDK seperti tahun-tahun sebelumnya. Kementerian Sosial telah melaksanakan Rehabilitasi Sosial Rumah

Tidak Layak Huni (RS-RTLH) bagi 4.856 KK di 37 Kabupaten dan Kota pada 16 provinsi. Tahun 2009 kegiatan tersebut dilanjutkan di 22 Kabupaten dan Kota di 13 Provinsi sebanyak 2.346 Unit dengan tambahan sarana prasarana lingkungan sebanyak 40 unit pelaksanaannya bekerjasama dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Tahun 2010 kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana dan Lingkungan dilaksanakan dengan mekanisme bantuan langsung kepada kelompok penerima melalui rekening pada bank pemerintah. Kegiatan dilaksanakan dengan bergotong-royong yang bertujuan untuk menghidupkan kesetiakawanan sosial atau modal sosial di masyarakat.

Jumlah rumah yang direhabilitasi sebanyak 6.142 unit dan sarling 122 unit. Tahun 2011 setelah adanya pembagian unit kerja yang menangani masalah kemiskinan secara kewilayahan yaitu untuk wilayah perkotaan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan untuk wilayah desa oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan. Khusus untuk wilayah perkotaan dilaksanakan RSRTLH sebanyak 3.043 KK Sarling 25 unit. Kemudian tahun 2012 RSRTLH sebanyak 2.140 dan Sarling 50 unit. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah masyarakat miskin pada Maret 2012 mencapai 29,12 juta orang atau 11,96 persen dari total penduduk Indonesia saat ini. Jumlah tersebut sebanyak 2,3 juta penduduk bertempat tinggal di rumah tidak layak huni dan belum tersentuh oleh program pemerintah. Untuk menangani masalah tersebut perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat baik dunia usaha atau industri, dan elemen masyarakat lainnya. Sebagai wujud kepedulian masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya perbaikan rumah tidak layak huni Yayasan Jamiyyah Ar Rahmah Kuwait menyalurkan dana sebesar Rp 650.000.000,- untuk perbaikan rumah 65 unit. Perbaikan rumah terkonsentrasi pada desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

3. Pelaksanaan Perbaikan Rumah

Pelaksanaan perbaikan rumah dilakukan secara gotong royong oleh anggota masyarakat, baik masyarakat yang mendapatkan perbaikan rumah maupun yang tidak mendapatkan perbaikan rumah. Sebelum pelaksanaan perbaikan rumah dimulai, dibentuk kelompok-kelompok di masing-masing dusun. Jumlah kelompok yang mau mengerjakan perbaikan rumah tidak sama antara kelompok satu dengan yang lainnya, tergantung ketersediaan jumlah tenaga yang ada. Namun pada dasarnya banyak masyarakat sekitar yang terlibat di dalam gotong royong perbaikan rumah.

Dalam pembagian pekerjaan masing-masing anggota mempunyai tugas sendiri-sendiri, mulai dari tukang kayu, tukang batu, pembantu tukang dan tugas-tugas lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan kelompok selalu ada seorang yang ditunjuk untuk mengetuai dan mengawasi kegiatan. Biasanya orang yang ditunjuk sebagai ketua dalam kegiatan ini adalah warga masyarakat yang menguasai di bidangnya, atau orang yang mampu mengkoordinir warga, sehingga apabila ada kesulitan merekalah yang akan mengatasi kesulitan tersebut, bahkan setiap bulan petugas dari dinas sosial propinsi datang ke lokasi untuk memantau kegiatan perbaikan rumah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melihat perkembangan kegiatan dan sebagai pertanggungjawaban lembaga dalam penanganan masalah kemiskinan khususnya perbaikan rumah.

Partisipasi yang diberikan masyarakat tidak hanya berupa uang, barang, tenaga, dan yang lebih terlihat nyata mereka yang melakukan pekerjaan juga membawa bahan makan ataupun makanan dari rumah sehingga waktu istirahat, mereka makan bersama-sama. Tenaga yang mengerjakan perbaikan rumah tidak mendapatkan upah sama sekali, bahkan yang lebih menyenangkan hati mereka yang tidak mendapatkan bantuan bedah rumahpun mendengar tetangganya yang tidak mampu mendapatkan bantuan mereka merasa senang dan turut berpartisipasi dalam perbaikan rumah. Hasil pengamatan dilokasi penelitian

menunjukkan bahwa apabila dilihat kondisi rumah dan sosial ekonomi masyarakat secara umum dapat dikategorikan cukup, karena kondisi rumah masyarakat umumnya permanen, hanya keluarga-keluarga yang mendapatkan perbaikan rumah kondisinya memang sangat memprihatinkan. Hal ini menjadi salah satu pendorong partisipasi masyarakat yang cukup kuat untuk membantu mereka yang tidak mampu, perbaikan rumah dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, atas partisipasi dari semua pihak, sehingga target 65 rumah dapat terselesaikan.

Hasil pengamatan di lapangan dan informasi dari peserta FGD, dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak hanya sekedar renovasi tetapi membangun rumah baru. Pada umumnya rumah aslinya dirobohkan karena memang sudah reyot, kemudian dibuat rumah baru yang permanen, sehingga setelah dilaksanakan perbaikan rumah tidak terlihat lagi kondisi rumah yang tidak layak huni.

Biaya untuk membangun rumah tidak hanya diperoleh dari donator Kuwait, tetapi dana dampingan dari pemerintah daerah dan masyarakat sekitarnya juga berperan di dalam membangun rumah. Informasi yang diperoleh dari peserta FGD untuk satu rumah menghabiskan dana sekitar Rp 25.000.000,- bahkan lebih, padahal dana yang tersedia untuk renovasi rumah hanya Rp 10.000.000,-, kekurangan dipikul masyarakat sekitarnya secara gotong royong. Dengan dana yang tersedia menghasilkan bangunan yang permanen, yaitu tembok dari bata merah dan batako, lantai keramik dan atap dari genteng. Semua bahan bangunan disiapkan panitia sebelum dana bantuan cair, pemilik rumah tinggal minta bahan-bahan tersebut sesuai dengan besar kecilnya bangunan dan keinginan pemilik rumah sesuai kebutuhan.

Di lokasi juga dibuat MCK umum yang dananya diperoleh dari anggaran APBN, tujuannya agar masyarakat dapat memanfaatkan MCK tersebut secara bersama-sama, bahkan bagi masyarakat yang tidak memiliki MCK dapat menggunakan untuk keperluan mandi,

cuci dan buang air besar, paling tidak dengan tersedianya MCK masyarakat tidak sembarang kalau buang hajat tidak di kali atau di tempat yang tidak semestinya. Seperti telah diuraikan, bahwa pengelolaan program perbaikan rumah dari, oleh dan untuk masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dengan dana Rp 10.000.000,- (bantuan dari Kuwait dan APBD) sebagai dana pancingan dapat mewujudkan rumah yang layak huni dengan pengeluaran yang lebih besar, menunjukkan bahwa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap sesama warga dan lingkungan cukup dapat diandalkan. Rasa tanggung jawab diwujudkan dalam bentuk partisipasinya kepada keluarga yang tidak mampu, dalam bentuk sumbangan uang, tenaga, pikiran sehingga dapat mendorong anggota masyarakat lain untuk berpartisipasi aktif dalam program bedah kampung.

Keberhasilan RTLH juga tidak lepas dari peran aparat desa, tokoh masyarakat di tingkat desa yang memfasilitasi dalam pembentukan panitia dan mengerahkan masyarakat untuk bergotong royong, camat berperan dalam memfasilitasi proposal program bedah kampung hingga selesainya program. Kontribusi pemerintah daerah juga sangat membantu dalam penambahan dana bedah kampung, sehingga rumah yang direncanakan hanya direnovasi menjadi rumah baru permanen dengan lantai keramik dan dinding tembok. Dengan demikian apabila dilihat secara umum tidak tampak kesenjangan sosial antara anggota masyarakat satu dengan yang lainnya, sehingga hubungan sosial mereka lebih akrab, tidak merasa rendah hati atau minder, bahkan mereka tidak perlu lagi memikirkan kondisi rumah dan dapat terkonsentrasi peningkatan ekonomi keluarga.

Dengan selesainya perbaikan rumah membawa dampak positif bagi warga masyarakat sekitarnya. Kesenjangan masyarakat terutama kepemilikan tempat tinggal tidak nampak mencolok walaupun mungkin dari kondisi sosial ekonomi masih terdapat perbedaan, masyarakat merasa senang keluarga yang semula mampu

nyai rumah tidak layak huni menjadi layak huni, keakraban antarwarga juga terjalin dengan baik, kepedulian sosialnya meningkat bahkan bagi keluarga yang mendapatkan program perbaikan rumah tidak merasa percaya dirinya tinggi sehingga tidak ada rasa sungkan, minder, rendah diri untuk bergaul dengan tetangga lainnya. Upaya penanggulangan kemiskinan terpadu dapat menyentuh akar masalah, seperti adanya perubahan sikap, pemenuhan kebutuhan perumahan dan lingkungan yang sehat ataupun peningkatan status sosial dan ekonomi masyarakat miskin.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah partisipasi masyarakat sebagai faktor pendukung dalam melakukan perbaikan rumah yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong dan tolong menolong di antara sesama. Bentuk partisipasi tenaga terlihat pada waktu membangun rumah, masyarakat saling gotong royong dengan melakukan tugasnya masing-masing, ada yang membuat fondasi, memasang bata, menjadi tukang kayu. Partisipasi dalam bentuk materi dalam dilihat dari warga masyarakat yang menyumbang uang, membawa makanan masing-masing agar tidak merepotkan yang punya rumah, bahkan bantuan moril dalam bentuk perasaan senang warga masyarakat yang tidak mampu mendapatkan bantuan renovasi rumah. Terbatasnya jumlah warga masyarakat yang bisa menjadi tukang sebagai faktor penghambat, sehingga terpaksa menunggu giliran, walaupun demikian tetap ada yang dapat dikerjakan. Masalah lain sebagai kendala dalam kegiatan adalah faktor cuaca yang kurang bersahabat, karena saat pelaksanaan kegiatan hampir setiap hari diguyur hujan. Akibatnya pelaksanaan kegiatan bedah kampung agak tersendat, walaupun kegiatan tetap berjalan sesuai target.

4. Pembahasan terhadap RTLH

Pada dasarnya program perbaikan rumah tidak layak huni yang telah dilakukan selama ini cukup mendasar dengan melibatkan elemen

masyarakat, mulai dari perencanaan, kegiatan, pengawasan hingga pada laporan. Namun perlu diingat bahwa jangan sampai dengan program tersebut masyarakat atau keluarga menjadi ketergantungan terhadap program-program yang diluncurkan oleh pemerintah. Selama ini elemen masyarakat telah banyak melibatkan dalam kegiatan perbaikan rumah dengan sistem gotong royong, tetapi yang tidak kalah penting dalam perbaikan rumah adalah merubah pola pikir masyarakat akan kepedulian terhadap lingkungan, baik terhadap manusia maupun terhadap lingkungan sosial, karena dengan kepedulian dan tanggap terhadap lingkungan membawa masyarakat selalu ingin untuk saling membantu sesama di lingkungan mereka tinggal, sehingga kearifan lokal yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat tetap terpelihara dan terjaga dengan baik, sebagai gambaran nyata pada masyarakat, di Jawa dengan istilah *sambatan*. Apabila seseorang atau keluarga mau membuat rumah, tetangga dengan tulus ikhlas membantu tanpa pamrih mengerjakan yang bisa dikerjakan dalam rangka tolong menolong membuat rumah.

Di desa Sidorejo, Kabupaten Magelang tampak kearifan lokal masih terpelihara dengan baik. Program perbaikan rumah yang dilakukan oleh dermawan Kuwait (Yayasan Jam'iyah Ar Rahmah Kuwait) merupakan upaya untuk menangani masalah kemiskinan yang terfokus pada perbaikan rumah tidak layak huni dan penyediaan sarana prasarana lingkungan sehat. Program ini telah mendapatkan respons positif, baik dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang, masyarakat sekitarnya, masyarakat peduli maupun elemen ataupun lembaga masyarakat lainnya bahkan dermawan Kuwait (Yayasan Jam'iyah Ar Rahmah Kuwait).

Kepedulian ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi, baik uang, barang, tenaga, dan pemikiran. Partisipasi ini diwujudkan dari masyarakat peduli melalui dermawan Kuwait dalam bentuk dana sebesar Rp 650.000.000,- untuk 65 kk, dari pemerintah daerah kabupaten juga diwujudkan dalam bentuk dana dampingan

sebesar Rp 5.000.000,-, bahkan dari masyarakat sendiri bentuk partisipasinya menyangkut tenaga, pikiran, material, uang, bahkan adanya kepedulian masyarakat ikut merasakan senang apabila warga masyarakat yang kurang mampu mendapatkan program bedah kampung yang diberikan oleh pemerintah. Respons positif inilah yang sangat membanggakan dalam rangka menyambut program perbaikan rumah yang dilaksanakan oleh dermawan Kuwait dan pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan di masyarakat. Masyarakat menginginkan quota untuk penanganan masalah kemiskinan bisa ditambah dan program dilanjutkan hingga persoalan kemiskinan dapat teratasi. Permasalahan kemiskinan termasuk perbaikan rumah tidak layak huni tidak bisa ditangani oleh pemerintah sendiri tanpa ada bantuan dan kepedulian pihak lain. Dukungan dari berbagai pihak ini yang sangat diharapkan dalam membantu menangani masalah RTLH yang kalau diperhatikan makin lama makin bertambah jumlahnya.

Apabila persoalan ini tidak ditangani dengan baik maka jumlahnya untuk tahun-tahun mendatang akan membengkak lagi seiring dengan perkembangan penduduk dan permasalahan kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, kepedulian dari masyarakat ataupun lembaga lain di dalam membantu menangani masalah kemiskinan perlu disambut baik dan dijadikan mitra kerja dalam menangani masalah kemiskinan. Namun demikian perlu adanya kebijakan yang melandasi program perbaikan rumah yang dilakukan masyarakat dan organisasi ataupun lembaga lain, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan landasan peraturan, tanpa meninggalkan kearifan lokal.

Berbagai lembaga telah melakukan upaya penanggulangan masalah dimaksud, tetapi hasilnya belum mampu mengatasi masalah yang ada. Penanganan yang telah dilaksanakan masih terkesan fragmentaris dan belum sinergis di antara kementerian yang melakukan penanganan, meskipun telah ada program nasional yang dikoordinir oleh Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Secara umum terlihat bahwa masing-masing kementerian dan lembaga bergelut dengan bidangnya saja dan kurang memperhatikan cakupan wilayah kerja instansi lain.

Penanganan yang dilaksanakan mulai dari peluncuran program pemberdayaan fakir miskin melalui Lembaga Keuangan Mikro-Kelompok Usaha Bersama (LKM-KUBE) sejahtera dan (Baitul Mal at Tanwil Kelompok Usaha Bersama (BMT KUBE) tahun 2003-2005, dan sejak tahun 2006 dilaksanakan pola Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS); dan untuk tahun 2012 ini dengan program Bedah Kampung; hingga saat ini masih belum mampu mengentaskan masalah kemiskinan secara optimal. Terkait dengan program perbaikan rumah yang dilaksanakan di desa Sidorejo, apa dicermati tampak pemerintah daerah dan masyarakat peduli sudah berbuat banyak untuk terselenggaranya program, tetapi dukungan yang dilandasi dengan peraturan masih belum tampak. Kebijakan yang melandasi program tersebut hanya didasarkan pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial, sehingga pelaksanaannya terkesan berjalan sendiri. Pemerintah daerah belum mengeluarkan peraturan yang mendukung program perbaikan rumah yang dibuat oleh Kementerian Sosial. Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan peraturan yang mendukung program perbaikan rumah yang diselenggarakan oleh lembaga dan organisasi atau masyarakat peduli.

D. Penutup

Yayasan Jam'iyyah Ar Rahmah Kuwait telah membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni. Bantuan sebanyak 65 rumah dikonsentrasikan pada desa Sidorejo Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Biaya renovasi rumah sebesar Rp 10.000.000,- per unit, namun dalam kenyataan biaya untuk membangun (bukan renovasi) per unit rumah mencapai 20 juta sampai dengan 25 juta. Tambahan biaya ini diperoleh dari partisipasi

masyarakat setempat, dana pendampingan sebesar 5 juta per rumah, diambilkan dari APBD Kabupaten Magelang tahun 2012. Kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat setempat dengan melibatkan Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pramuka.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran serta semua pihak seperti aparat desa, tokoh masyarakat yang memfasilitasi dalam pembentukan panitia dan mengarahkan masyarakat untuk bergotong royong, camat berperan dalam memfasilitasi proposal program bedah kampung hingga selesainya program ini. Kontribusi pemerintah daerah juga sangat membantu dalam penambahan dana perbaikan rumah, sehingga rumah yang direncanakan renovasi menjadi rumah baru permanen dengan lantai keramik dan dinding tembok. Kepedulian semacam ini perlu ditingkatkan terus agar masalah kemiskinan segera dapat tertangani, dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah pusat-daerah, dunia usaha atau industri, masyarakat, termasuk masyarakat peduli kemiskinan. Dengan memupuk kepedulian diharapkan partisipasi dari berbagai pihak dapat meningkat sehingga tercipta suasana harmonis, saling membantu, dan saling bergotong royong, sehingga nilai-nilai kearifan lokal dapat tumbuh dan berkembang kembali.

Pustaka Acuan

- Andi Prastowo, (2010). *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogakarta: Diva Press.
- Anonim, (2011). *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi RSRTLH dan Sarling 2010*. Jakarta; Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.
-, (2012b). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni*. Jakarta: Puslitbangkesos.
- Burhan Bungin, (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edi Suharto, (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan Sumodiningrat, (2009). *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Harry Hikmat, dkk, (2006). *Pedoman Analisis Kebijakan Sosial*. Jakarta: UI & Kementerian Sosial.
- Hill, Michael (1996), *Social Policy : Comparative Analysis*, London: Prentice-Hall Wheat Sheaft.
- Isbandi Rukminto Adi, (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: LP FEUI
- Jayaputra, Achmadi (1999). *Pemanfaatan Bantuan Modal Usaha di Daerah Kumuh, Kotamadya Sawahlunto*. Jakarta; Puslitbangkesos.
- Koentjaraningrat, (1999). *Pengantar Antropologi* (Jilid 1). Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Bambang, (2013). “Mengaktualisasi Kembali KUBE” dalam *Informasi*, Vol 18, No 1.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2010-2014*, khususnya tentang penanggulangan kemiskinan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*
- Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (2012)
- Penanggulangan Kemiskinan Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (2012)
- Rencana Strategis Program Pemberdayaan Fakir Miskin tahun (2010-2014)
- Samsul Hadi, dkk, (2011). *Metode Riset Evaluasi*. Jogjakarta: Lakbang Grafika.
- Santoso Sastropoetro, (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung; Alumni.
- Segal, Elizabeth E, and Brzuzy Stephanie (1998), *Social Welfare Policy, Programs, and Practice*, Itaca, Illinois: F.E Peacock Publishers, Inc.
- Shortel and Richardson (1978), *The Evaluation Process*, in ‘Health Program Evaluation’, St Louis: CV Mosby Company
- Soerjono Soekanto, (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumaryadi, I Nyoman, (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.